

## Pemkab Sukoharjo Buka Pendaftaran Mudik Gratis

**SUKOHARJO (KR)** - Pemkab Sukoharjo membuka pendaftaran program Mudik Gratis Lebaran 2024 dengan kuota terbatas, 350 orang. Peserta mudik gratis akan diangkut menggunakan tujuh armada bus. Pendaftaran dilayani melalui WhatsApp 08161169233 dan 08777620892. Syarat peserta hanya mengumpulkan fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Sukoharjo.

Program Mudik Gratis Lebaran 2024 dilayani dari Jakarta ke Kabupaten Sukoharjo. Pemberangkatan bus akan dilaksanakan 6 April 2024 di Taman Mini Indonesia Indah (TMI) Jakarta sekitar pukul 10.00 WIB.

"Pendaftaran bisa dilakukan secara personal ataupun melalui koordinator. Pendaftaran sudah dibuka," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sukoharjo Toni Sri Buntoro, Selasa (27/2).

Menurut Toni, program Mudik Gratis disiapkan dimaksud sebagai fasilitasi transportasi bagi warga Sukoharjo yang merantau di Jakarta dan sekitarnya. Animo warga perantau mengikuti Mudik Gratis biasanya sangat tinggi, sehingga warga perantau di Jakarta harus segera mendaftar. Tujuh armada bus yang disiapkan Pemkab Sukoharjo tahun ini sudah lebih banyak, dibandingkan Lebaran tahun lalu yang hanya empat armada bus.

Penambahan jumlah armada bus dilakukan karena tingginya animo pemudik mengikuti Mudik Gratis Lebaran.

"Selain untuk mempermudah warga pemudik mencari transportasi, Mudik Gratis juga untuk meringankan beban pemudik pulang kampung," jelas Toni.

Untuk menyiapkan tujuh armada bus, Pemkab Sukoharjo menyiapkan anggaran sekitar Rp 122,5 juta. Nilai tersebut lebih tinggi dibanding Program Mudik Gratis Lebaran tahun 2023, sebesar Rp 70 juta untuk empat armada bus. Saat ini, Dishub Sukoharjo sedang mempersiapkan terkait teknis pelaksanaan.

"Dengan persiapan yang dilakukan jauh hari, diharapkan menjadi lebih matang. Di sisi lain, pemudik segera mendapat kepastian informasi yang jelas mengenai program Mudik Gratis Lebaran 2024 ini," tandas Toni. (Mam)-f

## PEMKAB SUKOHARJO JAMIN AMAN Kebutuhan Beras dari Petani Lokal

**SUKOHARJO (KR)** - Kebutuhan beras masyarakat dijamin aman dari hasil panen petani lokal Sukoharjo dan tidak perlu sampai mendatangkan beras impor. Tingginya harga beras sekarang terjadi karena kondisi pasar dan maraknya penyaluran bantuan sosial (bansos). Diharapkan panen padi pada Maret mendatang saat puasa Ramadan mampu menekan kenaikan harga dan menambah stok barang dipasaran.

Pemkab Sukoharjo pada dasarnya masih mampu memenuhi kebutuhan beras masyarakat dari hasil panen petani lokal. Bahkan Kabupaten Sukoharjo mampu swasembada pangan dan surplus beras dari petani setempat.

Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Senin (26/2) mengatakan, Pemkab Sukoharjo melalui berbagai upaya telah melakukan usaha menekan harga beras dipasaran. Namun demikian harga beras tetap masih tinggi. Penyebabnya, permintaan beras sekarang sangat banyak. "Kebutuhan beras tinggi, salah satunya karena adanya penyaluran bansos," jelasnya.

Meski demikian, lanjut bupati, ke-

beradaan penyaluran bansos juga mampu membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan secara gratis. Beras diberikan kepada warga yang sudah masuk dalam pendataan pemerintah. "Ada penyaluran bansos Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) beras, Gerakan Pangan Murah (GPM), pasar murah, dan lainnya," ungkapnya.

Etik Suryani minta masyarakat tenang, terkait pemenuhan kebutuhan pangan beras. Pemkab Sukoharjo juga meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melakukan upaya-upaya peningkatan hasil panen padi dan penyediaan kebutuhan pangan beras. "Kami sudah menerima laporan dari OPD terkait mengenai upaya penyediaan pangan. Termasuk rencana panen padi petani Sukoharjo pada Maret nanti. "Informasinya, Maret petani sudah panen padi. Hasilnya mampu menambah stok beras di pasaran," tandas Etik.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Diskopumdag) Sukoharjo, Iwan Setiyono membenarkan kondisi pasar sekarang harga beras memang masih tinggi, sekitar Rp 17.000 per-

kilogram untuk beras premium dan Rp 15.000 sampai Rp 15.500 per kilogram untuk beras medium. Harga tersebut sudah mengalami penurunan sekitar Rp 500 hingga Rp 1.000 perkilogram, dibanding sebelumnya.

"Panen padi MT I Maret mendatang bersamaan dengan puasa Ramadan, sehingga akan menambah stok beras di pasaran dan menekan harga," jelasnya.

Terpisah, Ketua Paguyuban Pe-

tani Pengguna Air (P3A) Dam Colo Timur, Jigong Sarjanto juga mengakui, petani sekarang masih melakukan perawatan tanaman padi dan belum ada yang panen.

Hal tersebut terjadi karena petani, khususnya di sepanjang aliran saluran irigasi Dam Colo Timur, melakukan tanam padi untuk musim tanam I (MT I) dengan waktu bervariasi atau tidak serempak. Penyebabnya, kebutuhan air untuk tanam padi sulit terpenuhi. (Mam)-f



KR-Wahyu Imam Ibad

Pedagang beras di Pasar Kartasura sedang melayani pembeli.

## PROGRAM STABILISASI HARGA POKOK PANGAN

# Di Karangpandan, 3 Ton Beras Habis

**KARANGANYAR (KR)** - Komoditas beras paling diminati di program pasar murah sembako di Kecamatan Karangpandan, Senin (26/2). Sebanyak 3 ton beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ludes terjual tanpa perlu kartu kendali.

Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan bekerjasama dengan Bulog Surakarta juga menyediakan paket sembako murah lain, yakni minyak goreng gula pasir.

Di lapak yang dibuka di halaman Kantor Kecamatan Karangpandan itu juga tersedia telur ayam milik para peternak yang langsung dijual ke konsumen.

Kepala Dispartan PP Karanganyar, Siti Maesyaroeh mengatakan penjualan sembako program stabilitas pasokan dan harga pangan direspons baik. Terutama kalangan ibu rumah tangga. Ia sudah memprediksi penjualan beras SPHP bakal diserbu.

"Di sini ada tiga ton atau 600 karung beras 5 kiloan. Enggak perlu

lama-lama, habis. Di Mojogedang kemarin saja jam 7 pagi sudah menunggu. Saya minta Pak Camat segera memulai saja penjualannya, begitu warga sudah banyak berkumpul," ungkapnya.

Menurut Siti Maesyaroeh, ada 12 kali putaran pasar murah sembako dalam setahun. Untuk putaran kelima, ia berencana menggelarnya di pelataran Gedung Kebudayaan Karanganyar. Ada lima ton beras SPHP yang akan dijual di sana.

Di pasar murah putaran ketiga ini, warga boleh membeli dua sak beras SPHP. Satu sak berisi lima kilogram dibanderol Rp 51.000.

Kemudian satu kilo gula dan satu liter migor Rp 30.000. Lalu, sekilo telur ayam Rp 28.000.

Kabid Ketahanan Pangan, Budi Sutrisno mengakui antusias masyarakat di pasar murah sembako di Karangpandan tak sebanyak di Mojogedang. Sehingga ia membolehkan pembelian beras dua sak.

"Jam 10.30 WIB habis beresnya. Nanti dalam bazar di Gedung Kebudayaan juga tak pakai kartu kendali. Kita pakai kupon saat kerja sama dengan PUDAM yang menggelar pasar murah di Karangpandan saja kemarin itu," katanya. (Lim)-f

# HUKUM

## Gadai Motor, Malah Dicuri



KR-Dani Ardiyanto

**Tersangka ES beserta barang bukti sepeda motor diamankan di Polres Kulonprogo.**

**WATES (KR)** - Petugas Polsek Kokap mengamankan seorang pria inisial ES (26) warga Hargowilis Kokap, karena telah mencuri sepeda motor miliknya sendiri, yang telah digadaikan kepada DS (27) warga Purbalingga Jawa Tengah.

Kapolsek Kokap, AKP Toha, Senin (26/2) siang, mengatakan kasus pencurian sepeda motor Yamaha

N-Max Nopol AB 2820 EP ini terjadi pada 12 Februari 2024 sekitar pukul 17.00, dengan TKP di jalan lingkar waduk Sermo wilayah Hargomulyo Kokap.

Sepeda motor tersebut digunakan korban pergi memancing di jalan lingkar waduk Sermo sekitar pukul 15.00.

Sampai di TKP sepeda motor diparkirkan di pinggir jalan dan sudah dikun-

ci ganda. Saat hendak pulang sepeda motor telah hilang. Korban mencari di sekitar TKP namun tidak berhasil ditemukan.

"Korban kemudian melaporkan kejadian ini ke Polsek Kokap. Dari laporan korban, petugas kemudian melakukan olah TKP dan penyelidikan. Dari hasil lidik, petugas berhasil mengidentifikasi pelaku dan mengamankan ES di rumah ditemannya di Kaligesing Purworejo Jawa Tengah," jelasnya.

Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 362 ayat 5 juncto pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.

Pelaku ES mengaku sepeda motor miliknya telah digadaikan kepada temannya saat masih sekolah, DS sebesar Rp 16.500.000. Saat beraksi ia menggunakan kunci cadangan sepeda motor. (Dan)-f

## Lelaki Tua Cabuli Bocah 5 Tahun

**PURWOKERTO (KR)** - Petugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polresta Banyumas menangkap TP (41) warga Desa Sibrama Kemranjen Banyumas. Lelaki itu ditangkap karena diduga melakukan pencabulan terhadap bocah berusia lima tahun, teman main anaknya sendiri.

Kasat Reskrim Polresta Banyumas, Kopol Adriansyah Rithas Hasibuan, Selasa (27/2), menjelaskan penangkapan tersangka setelah polisi menerima laporan dari keluarga korban Sabtu, (24/2) lalu.

"Setelah mendapati laporan tersebut, kami langsung menangkap terduga pelaku untuk kami mintai keterangan lebih lanjut," jelas Kopol Hasibuan, Selasa (27/2).

Kasat Reskrim menjelaskan kronologi pencabulan yang dilakukan TP terhadap korban ANP (5) yang merupakan tetangganya sendiri, dilakukan pada hari Kamis (18/1) sekitar

pukul 17.00.

"Saat itu, korban sedang bermain dengan anak pelakunya di rumahnya. Kemudian TP menuntun korban hingga masuk kamar dan melakukan pencabulan," ujar Kasat Reskrim.

Setelah kejadian itu, korban pulang kerumahnya

dan menngis kemudian menceritakan perbuatan pelaku kepada orangtuanya. Hingga akhirnya pihak keluarga korban sepakat untuk melaporkan TP ke polisi. Untuk pengusutan lebih lanjut, saat ini pelaku dan barang bukti sudah diamankan di kantor

Sat Reskrim Polresta Banyumas.

Berkaitan dengan perbuatan pelaku dikenakan Pasal 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan ancaman diatas lima tahun penjara. (Dri)-f



KR-Istimewa

Pelaku TP didampingi penasihat hukumnya saat menjalani pemeriksaan penyidik.

## PPPK Nyaleg Partai Golkar Divonis 4 Bulan

**KARANGANYAR (KR)** - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Karanganyar menjatuhkan vonis empat bulan kurungan dengan masa percobaan 10 bulan, denda Rp 3 juta subsider 1 bulan kurungan kepada Tarno, yang menjadi terdakwa dalam kasus pelanggaran tindak pidana Pemilu.

Dalam pertimbangan hukumnya, vonis yang dibacakan Majelis Hakim yang diketuai Haga Santosa menyatakan terdakwa Tarno terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 494 jo Pasal 280 ayat 3 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Menanggapi putusan majelis hakim tersebut, koordinator jaksa penuntut umum (JPU) Antoni Rhomadona, menyatakan masih berpikir.

Antoni menjelaskan, akan konsultasi dengan pimpinan untuk menentukan langkah hukum selanjutnya terhadap putusan majelis hakim yang menjatuhkan vonis empat bulan

kurungan kepada terdakwa. "Kami masih pikir-pikir. Kami akan melaporkan hasil sidang terakhir ini kepada pimpinan," jelasnya, Selasa (27/2).

Sementara itu, koordinator tim penasihat hukum terdakwa, Ari Santoso, menegaskan menerima putusan majelis hakim yang menjatuhkan vonis empat bulan kurungan kepada kliennya.

Ari menuturkan, pihaknya menghormati keputusan majelis hakim yang telah mewakili rasa keadilan masyarakat. "Kami menerima putusan majelis hakim atas vonis empat bulan kurungan kepada terdakwa," terangnya.

Di sisi lain, Ketua Bawaslu Karanganyar, Nuning Ritwanita Priliastuti, yang hadir dalam sidang tersebut mengungkapkan, putusan yang dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa merupakan proses pembelajaran bagi siapapun, terutama ASN atau PPPK agar tidak terlibat aktif dalam politik praktis.

"Ini bukan soal berapa lama putusan. Ini soal sikap tegas Bawaslu yang tetap mengambil tindakan terhadap siapapun yang melanggar aturan Pemilu," tandasnya.

Sebelumnya, tim jaksa penuntut umum (JPU) menuntut terdakwa Tarno, guru SD dengan status PPPK yang menjadi caleg dan tim kampanye Partai Golkar, enam bulan penjara. Tarno dituntut karena diduga melakukan pelanggaran tindak pidana pemilihan umum (Pemilu).

Tuntutan yang dibacakan JPU Antoni Rhomadona dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Karanganyar, Selasa (20/2) menyebutkan, terdakwa tidak menyebutkan identitas aslinya saat mendaftar sebagai calon anggota legislatif (Caleg) dalam Pemilu 2024.

Menurut JPU, terdakwa bersalah dan melanggar Pasal 494 jo Pasal 280 ayat 3 UU Pemilu 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Sementara itu, tim penasihat hukum ter-

dakwa, Ari Santoso, mengatakan pihaknya akan melakukan pembelaan pada sidang lanjutan yang akan digelar pada hari Rabu (28/2).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya sidang perdana kasus dugaan tindak pidana pemilihan umum (Pemilu) digelar di PN Karanganyar, Jumat (17/2) siang.

Sidang perdana dengan majelis haking yang diketuai Haga Santosa serta hakim anggota Al Fajri dan Sanjaya Sembiring tersebut, dengan agenda pemeriksaan identitas terdakwa dan pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dalam surat dakwaan JPU yang dibacakan Antoni Rhomadona, menyebutkan bahwa terdakwa Tarno merupakan guru dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 494 jo Pasal 280 ayat 3 UU Pemilu 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. (Lim)-f